

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya alat transaksi ekonomi dimulai dengan adanya sistem barter, yang merupakan metode pertukaran langsung antara barang dan barang, tanpa menggunakan alat pembayaran yang diakui secara umum. Sistem ini diperkirakan muncul sekitar 6000 SM di wilayah Mesopotamia, dan diikuti oleh bangsa Fenisia serta Babilonia, selama periode *Neolitikum* atau masa bercocok tanam (Rosventi, 2020). Sistem ini dilakukan dengan tata cara menukarkan hasil bumi kepada kelompok lain. Dan aktivitas barter ini juga memungkinkan terbentuknya kelompok baru, yaitu kelompok yang khusus menjalankan sistem barter dan berdiam diri di sebuah tempat yang telah disepakati bersamaan, di zaman sekarang mungkin lebih dikenal dengan sebutan pasar (Darumurti, 2024). Meskipun sistem barter memiliki kelebihan dalam kesederhanaan, ia juga menghadapi banyak keterbatasan, seperti kesulitan dalam menentukan nilai yang setara, kesulitan membawa barang yang akan ditukarkan, dan ketidakpraktisan dalam menemukan pihak yang saling membutuhkan pada waktu yang bersamaan.

Seiring berkembangnya peradaban dan kompleksitas perdagangan, manusia mulai mencari alternatif untuk mengatasi kendala yang ada dalam sistem barter. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang (*commodity money*), uang kertas (*Token Money*) dan uang giral (*deposit money*) (S. W. Sari, 2016). Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang bisa dijadikan uang; a) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas; b) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama. c) Nilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak

memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dalam sejarah, pemakaian uang barang pernah juga disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti beras. Namun kemudian uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan, diantaranya uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkut. (Affandi, 2020).

Disaat masa uang barang atau komoditas masih digunakan di berbagai dunia, beberapa pihak, seperti bank dan goldsmith (peminjaman uang), melihat peluang untuk meraih keuntungan dari kepemilikan mereka terhadap emas dan perak. Berdasarkan hal itu, bank dan goldsmith mulai mengeluarkan tanda terima (*receipt*) atau uang kertas, yang kemudian difungsikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dengan demikian, tanda terima untuk deposito atau uang bank, yang dikenal sebagai uang kertas (*token money*), menggantikan uang komoditas (Pertiwi, 2019). Sementara itu, Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bias digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. (S. W. Sari, 2016).

Konsep mengenai uang ini terus mengalami perkembangan dan diterapkan dalam konteks sejarah, termasuk pada masa kenabian. Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar dan dirham emas Hercules, Byzantium dan dirham perak dinasti sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, dan Yaman (S. W. Sari, 2016). Penduduk Makkah tidak melakukan transaksi jual beli kecuali dengan emas yang belum ditempa dan hanya menerima pembayaran berdasarkan timbangan, bukan berdasarkan jumlah bilangan. Hal ini dikarenakan adanya variasi dalam bentuk dan ukuran dirham, serta praktik penipuan dimana nilai yang tertera pada uang seringkali lebih tinggi dari nilai aslinya. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti sistem timbangan yang berlaku di Makkah saat bertransaksi

ekonomi, dengan menggunakan dirham berdasarkan timbangan, bukan jumlah bilangan (Susanti, 2018).

Dalam penelitian oleh (Akbar et al., 2022) Saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak melakukan perubahan apapun terhadap mata uang yang beredar, melainkan mempertahankan sistem yang sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hal yang sama juga dilakukan oleh Umar Bin al-Khattab setelah diangkat menjadi khalifah. Karena kesibukannya dalam menyebarkan Islam ke berbagai negara, Umar tetap mempertahankan penggunaan mata uang yang sudah berlaku pada masa sebelumnya. Selanjutnya pada masa dinasti Muawiyah, percetakan uang masih mengikuti model dari kerajaan Sasani, namun dengan penambahan beberapa kalimat tauhid, mirip dengan yang dilakukan pada masa Khulafaurasyidin (S. W. Sari, 2016).

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Syukur, 2020) dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Abdul Malik Bin Marwan, sekitar tahun 76 Hijriyah (695M), beliau yang pertama kali memperkenalkan mata uang Islam dengan desain yang khas dan menonjolkan pola Islam tersendiri dengan menghilangkan tanda-tanda byzantium dan persia, serta bertuliskan kaligrafi arab yang menyebutkan kalimat tauhid dan ayat-ayat Al-Quran. Ini menandai awal dari pencetakan dinar dan dirham yang sepenuhnya bercirikan Islam. Penerapan percetakan uang Islam ini berhasil mendukung tercapainya stabilitas politik dan ekonomi, serta mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.



Gambar 1.1 koin dinar pada masa kekhalifahan Abdul Malik Bin Marwan
(Collection of the Egyptian National Library, 1982)



Gambar 1.2 koin dirham pada masa kekhalifahan Abdul Malik Bin Marwan
(Baldwin's, 1872)

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas mengenai awal kemunculan uang, tetapi ia membuat referensi yang relevan terkait dengan uang dan keberlanjutannya. Uang dalam Al-Qur'an sering kali diidentifikasi dengan istilah dinar, dan dirham, yang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), standar pengukuran nilai (*unit of account*), dan media penyimpanan kekayaan. Ayat-ayat seperti surah Ali Imran ayat 75 dan surah At-Taubah ayat 34 menyoroti

uang sebagai media pertukaran dalam jual beli dan standar ukuran harga barang-barang (Iqbal, 2019). Uang juga kerap dihubungkan dengan kebahagiaan dan kesenangan hidup di dunia, seperti yang dicontohkan dalam surah Ali Imran ayat 14, yang menyebutkan harta yang banyak dari jenis emas dan perak sebagai kesenangan hidup di dunia (Sofiah et al., 2019).

“Di antara Ahlulkitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula) di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (Q.S.Ali Imran: 75)

Surah ini memberikan gambaran mengenai kepercayaan dan tanggungjawab dalam mengelola harta, khususnya dalam konteks hubungan antara individu dan ahlikitab. Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa diantara banyaknya ahli kitab terdapat dua tipe orang, dimana yang pertama dapat dipercaya dan akan mengembalikan harta yang dipercayakan kepada mereka, bahkan jika jumlahnya besar. Yang kedua, adalah mereka yang tidak akan mengembalikan bahkan satu dinarpun kecuali jika selalu diawasi dan ditekan untuk melunasinya. Hal ini mencerminkan sifat ketidakjujuran yang ada pada sebagian orang, dimana mereka merasa tidak ada konsekuensi moral terhadap tindakan mereka.

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (Q.S. At-Taubah: 34)

Ayat ini mengkritik mengenai perilaku buruk sebagai pemimpin agama Yahudi dan Nasrani yang menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh harta dengan cara yang batil, seperti suap, riba, penipuan, dan manipulasi ajaran agama demi kepentingan pribadi. Selain itu, mereka menghalangi orang untuk mengikuti jalan Allah,

menyebarkan kebohongan tentang Islam, meragukan Al-Qur'an, dan menghina Raulullah. Mereka juga disebut sebagai orang yang kikir dan serakah, karena menyimpan harta tanpa menginfakannya di jalan Allah. Sebagai balasan, mereka menerima azab yang pedih di akhirat sebagai akibat dari kerusakan akhlak, pemikiran, dan akidah yang mereka ajarkan.

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q.S. Ali Imran: 14)

Ayat ini menggambarkan bahwa bagi banyak orang, kehidupan dunia ini dipenuhi dengan kecintaan terhadap berbagai kesenangan material, seperti harta, kekayaan, dan hal-hal yang bersifat duniawi, yang sering kali menjadi fokus hidup mereka. Kesenangan itu mencakup hal-hal seperti pasangan hidup (perempuan), anak-anak, harta benda yang melimpah (dinar dan dirham), kendaraan atau kuda pilihan, binatang ternak, dan tanah pertanian. Semua ini dianggap sebagai simbol kemewahan dan kebahagiaan duniawi yang bisa mengalihkan perhatian seseorang dari tujuan hidup yang lebih utama, yakni menvari ridha Allah dan kehidupan akhirat yang kekal.

Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan, melainkan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian kesulitan- kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi. (Ichsan, 2020). Uang juga dianggap sebagai media pertukaran yang diterima secara umum oleh masyarakat dan berfungsi sebagai pengukur nilai (*unit of account*) barang dan jasa. Sejarah mencatat bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, mata uang yang digunakan adalah dinar (emas) dan dirham (perak), yang dipilih karena stabilitas nilainya dan tidak terpengaruh akan inflasi seperti uang kertas pada saat ini (Yulianda et al., 2023). Uang dalam Islam juga diartikan

sebagai public goods, berbeda dengan modal yang merupakan private goods. Ini menunjukkan bahwa uang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh disimpan atau ditimbun untuk mendapatkan keuntungan pribadi, karena hal tersebut dapat mengarah pada praktik riba yang dilarang dalam Islam (Choirunnisak et al., 2019).

Konsep *public goods* pertama kali diungkapkan oleh Irving Fisher, seorang ekonomi terkemuka di Amerika, dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam pengembangan teori uang dan ekonomi. Karakteristik yang mendorong konsep uang sebagai public goods ini yaitu karena aksesibilitasnya, uang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang dalam masyarakat tanpa batasan (Choirunnisak et al., 2019). Serta tidak mengurangi penggunaannya. Penggunaan uang oleh satu individu tidak akan mengurangi kemampuan individu lain untuk menggunakan uang tersebut. Dengan kata lain, uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang tidak eksklusif (Bustami, 2024). Selain itu, dalam ekonomi Islam, uang tidak boleh ditimbun (*iktinaz*); uang tidak boleh *idle* (menganggur) ia harus diproduktifkan dalam bisnis riil, seperti melalui investasi mudharabah atau musyarakah (Bustami, 2024).

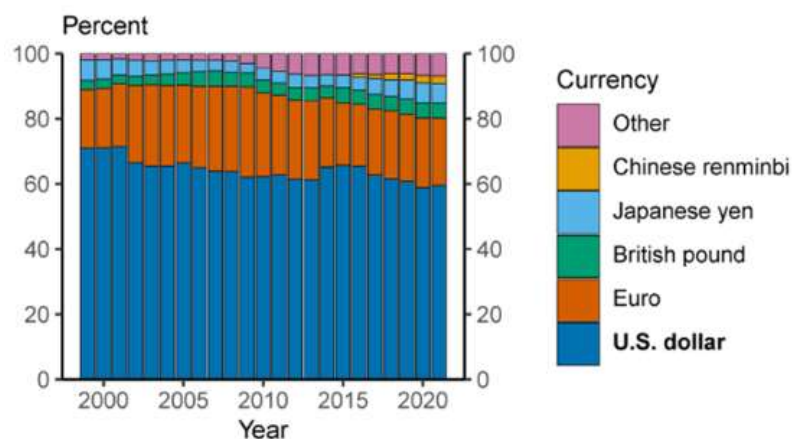
Setiap negara di dunia ini memiliki mata uang yang berbeda, hal ini mencerminkan identitas ekonomi dan budaya masing-masing negara. Perbedaan ini juga mencerminkan kondisi ekonomi dan kebijakan moneter masing-masing negara, serta mempengaruhi hubungan perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi global. Dengan ini, keberagaman mata uang di seluruh dunia menciptakan dinamika yang kompleks dalam sistem keuangan global, dimana fluktuasi nilai tukar dapat berdampak besar pada kegiatan ekonomi lintas negara (Sahabat Pegadaian, 2024). Mata uang nasional berfungsi sebagai alat tukar resmi dalam transaksi perdagangan, serta sebagai ukuran nilai untuk barang dan jasa suatu negara (Ichsan, 2020). Contohnya, dolar AS (USD) digunakan di Amerika Serikat dan menjadi salah satu mata uang cadangan dunia, sementara euro (EUR) dipakai oleh banyak negara di Uni Eropa sebagai simbol integrasi ekonomi. Di Asia, terdapat yen Jepang (JPY) dan rupee India (INR) juga menunjukkan kekuatan

ekonomi regional yang berbeda. Selain itu, dinar Kuwait (KWD) dikenal sebagai salah satu mata uang dengan nilai tertinggi di dunia, menunjukkan kekuatan ekonomi negara tersebut yang didukung oleh sumber daya minyaknya. Dengan lebih dari 180 jenis mata uang yang digunakan di seluruh dunia, perbedaan ini menciptakan kompleksitas dalam sistem keuangan global dan mempengaruhi hubungan perdagangan internasional serta investasi asing (Sahabat Pegadaian, 2024).

Dalam perdagangan internasional, Dolar Amerika Serikat (USD) telah menjadi acuan nilai tukar yang dominan. Hal ini didasari oleh alasan historis dan ekonomi Amerika. Sebelumnya, Inggris lah pemegang mata uang dominan dunia melalui Pound Sterling, namun harus terpaksa meninggalkan standar emas pada tahun 1931 karena kebutuhan untuk meminjam uang (Teslya & Podolskaya, 2020). Dolar AS resmi pertama kali diakui sebagai mata uang cadangan dunia sejak akhir perang dunia II setelah perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 di New Hampshire yang ditandatangani oleh 44 negara, dan menetapkan bahwa mata uang dunia akan terikat pada Dolar AS yang didukung oleh cadangan emas (UnairNews, 2023). Tercatat cadangan emas Amerika Serikat pada saat itu berada di angka 70% dari total cadangan emas dunia pasca perang dunia II. Dalam konteks ini, Amerika Serikat menjadi pemegang standar moneter global melalui perjanjian Bretton Woods (Federal Reserve Bank of Atlanta, 2013).

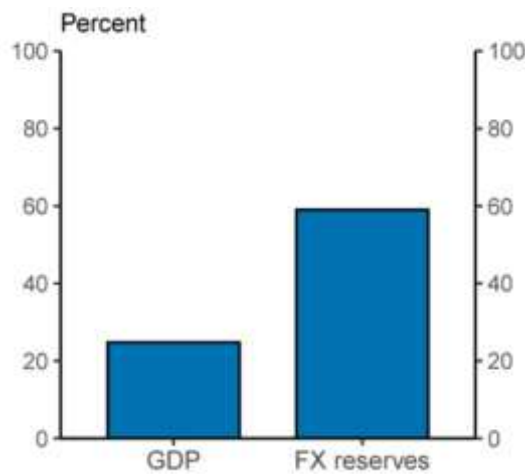
Cadangan emas AS pada saat itu menjadi penyangga utama bagi nilai dolar dan memberikan stabilitas kepada sistem moneter internasional. Negara-negara lain di dunia mengaitkan mata uang mereka dengan dolar AS, yang pada gilirannya terhubung dengan cadangan emas Amerika (Frassminggi, 2014). Ini berarti negara-negara lain dapat mengkonversi dolar Amerika kembali ke emas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, cadangan emas Amerika Serikat pada tahun 1944 tidak hanya berfungsi sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai dasar bagi sistem keuangan global yang baru, dimana dolar AS menjadi pusat dari transaksi internasional dan stabilitas ekonomi global.

Keberadaan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama memberikan kepercayaan kepada negara-negara lain untuk menggunakannya dalam transaksi internasional, karena stabilitas dan likuiditasnya yang tinggi. Selain itu, kekuatan ekonomi Amerika Serikat, sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, menjadikan Dolar AS sebagai pilihan utama dalam perdagangan global (UnairNews, 2023). Kemampuan dalam menyimpan nilai untuk diambil kembali di masa mendatang tanpa kehilangan daya beli yang signifikan merupakan fungsi utama dari mata uang. Dolar sendiri memiliki 60% dari cadangan devisa resmi yang diungkapkan secara global pada tahun 2021. Porsi ini telah menurun dari 71% di tahun 2000, tetapi masih jauh melampaui semua mata uang lainnya termasuk Euro (21%), Yen Jepang (6%), Pound Inggris (5%), dan Renminbi Tiongkok (2%) (Bertaut et al., 2021).



Gambar 1.3 Porsi cadangan Devisa (IMF COFER).

Banyak transaksi internasional, terutama dalam komoditas seperti minyak dan emas, dilakukan dalam dolar AS, sehingga memudahkan negara-negara untuk melakukan perdagangan tanpa harus khawatir tentang fluktuasi nilai tukar yang tinggi pada saat itu. Selain sebagai transaksi internasional, Dolar AS juga dianggap sebagai “*safe haven*” atau aset aman, dimana investor cenderung beralih ke dolar AS saat kondisi ekonomi global tidak menentu. Hal ini semakin memperkuat posisi dolar AS dalam skema pembayaran internasional (R. Ginting, 2007).



Gambar 1.4 porsi AS dalam PDB dunia vs porsi Dolar AS dalam cadangan internasional (Bertaut et al., 2021).

Dengan lebih dari 60% cadangan devisa dunia disimpan dalam bentuk dolar AS, mata uang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga sebagai penyimpanan nilai bagi banyak negara (Juliansyah et al., 2020). Oleh karena itu, meskipun ada banyak mata uang lainnya di dunia, dolar AS tetap menjadi acuan utama dalam transaksi internasional karena stabilitasnya yang tinggi dan kepercayaan global yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Dengan demikian, keberlanjutan posisi dolar AS sebagai acuan nilai tukar dalam perdagangan internasional mencerminkan kombinasi dari sejarah panjang, kekuatan ekonomi, dan kepercayaan global.

Mata uang internasional adalah mata uang yang digunakan secara luas dalam transaksi global dan sering dijadikan patokan untuk nilai tukar mata uang lainnya. meskipun banyak negara memiliki mata uang mereka sendiri, tidak semua mata uang tersebut dapat berfungsi sebagai acuan internasional. Dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia tidak terlepas dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, politik, dan sejarah yang mendukungnya. Sementara itu, mata uang negara lain sering kali tidak dapat bersaing untuk menjadi acuan internasional. Sebagai contoh, meskipun Dinar Kuwait (KWD) merupakan salah satu uang terkuat di dunia, dengan nilai tukar yang tinggi terhadap dolar AS (USD), ada beberapa alasan mengapa Kuwait tidak dapat dijadikan sebagai mata

uang acuan internasional seperti halnya dolar AS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kayoumy, 2010) alasan pertama adalah karena Kuwait memiliki ekonomi yang sangat bergantung kepada ekspor minyak. Meskipun memberikan kekayaan yang signifikan, ketergantungan pada satu komoditas membuat ekonomi Kuwait rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Disisi lain, dolar AS didukung oleh ekonomi yang lebih beragam dan kuat, mencakup berbagai sektor seperti teknologi, keuangan, dan industri.

Selain alasan ekonomi, Dinar Kuwait juga tidak dapat diperdagangkan secara luas di pasar internasional seperti dolar AS. Likuiditas adalah faktor kunci dalam menentukan mata uang acuan, semakin banyak mata uang diperdagangkan, semakin besar kepercayaan yang dimilikinya di pasar global (AlAli, 2020). Dollar AS memiliki volume perdagangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Dinar Kuwait. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah Dolar AS yang telah lama menjadi simbol stabilitas dan kekuatan ekonomi. Sejak perjanjian Bretton Woods, kepercayaan terhadap Dolar sangat tinggi di kalangan negara-negara lain untuk menyimpan cadangan devisa mereka (UnairNews, 2023). Meskipun Dinar Kuwait memiliki nilai tukar yang tinggi, persepsi global terhadapnya masih terbatas. Alasan terakhir karena infrastruktur keuangan untuk mendukung penggunaan Dinar Kuwait dalam transaksi internasional tidak sebanding dengan yang ada untuk Dolar AS. Sistem perbankan dan lembaga keuangan di AS menawarkan layanan yang lebih luas dan lebih terintegrasi secara global dibandingkan dengan yang tersedia untuk Dinar Kuwait (Cecchetti, 2014).

Meskipun memiliki kelebihan, Dolar AS juga tidak luput dari kekurangannya sebagai mata uang acuan. Seperti halnya negara-negara lain yang sangat bergantung kepada kesehatan ekonomi AS. Hal ini suatu saat akan mengalami masalah ketika keadaan ekonomi AS sendiri sedang terguncang, dampaknya bisa dirasakan secara global, termasuk fluktuasi nilai tukar yang tajam (D'Arista, 2004). Kebijakan moneter AS yang longgar juga dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli Dolar di pasar internasional. Meskipun saat ini Dolar dianggap stabil, masih terdapat resiko

bahwa kepercayaan internasional dapat terguncang jika terjadi krisis besar atau jika kebijakan pemerintah AS tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi (UnairNews, 2023). Terakhir, walaupun saat ini tidak ada mata uang lain yang dapat menguncang posisi Dollar, perkembangan ekonomi di negara-negara seperti Tiongkok dengan Yuan-nya bisa menjadi tantangan di masa depan (Bansal & Singh, 2021).

Jika dilihat dari historis dan keadaan ekonominya, Dollar AS tentu memiliki pengaruh terhadap negara-negara yang menjadikannya mata uang acuan, termasuk negara-negara maju dan berkembang. Pengaruh ini dapat terjadi secara signifikan dan kompleks, terutama terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan situasi politik di AS. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Siddiqui, 2020) ketika Dollar menguat, negara-negara yang terikat dengan Dollar dan memiliki utang dalam Dollar akan menghadapi beban lebih berat karena nilai hutang yang akan naik dan lebih mahal. Kebalikannya, jika nilai Dollar melemah, barang-barang impor dari AS menjadi lebih murah, yang dapat menyebabkan inflasi di negara-negara berkembang yang bergantung pada impor dari AS. Jika harga komoditas yang diperdagangkan dalam Dollar naik, negara-negara pengimpor akan menghadapi kenaikan biaya.

Saat dollar mengalami penguatan pada tahun 2022, Argentina sangat terpuak karena memiliki banyak hutang luar negeri yang harus dibayar dalam USD. Pemerintah terpaksa menaikkan suku bunga untuk menstabilkan mata uang lokalnya, tetapi hal ini justru memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan resiko resesi (Monteagudo, 2022). Konflik dalam negeri atau situasi politik di AS juga dapat mempengaruhi stabilitas Dollar. Misalnya selama krisis keuangan global 2008, ketidakpastian ini menyebabkan investor beralih ke Dollar sebagai “*safe heaven*”, memperkuat nilai dollar tetapi juga menciptakan ketidakstabilan bagi negara-negara yang berutang dalam mata uang tersebut. Konflik dapat menyebabkan volatilitas pasar keuangan, penurunan investasi asing, dan gangguan dalam rantai pasokan global (Sugema, 2012).

Tak hanya Argentina, Indonesia juga mengalami dampak dari penguatan dollar AS di tahun 2022. Penguatan itu dipicu oleh beberapa faktor ekonomi, yang salah satunya adalah karena kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh *Federasi Reserve (The Fed)* untuk mengatasi inflasi yang melonjak. Di tahun tersebut, inflasi AS mencapai puncaknya di angka 9,1% pada Juni 2022 (CNBC, 2023a). Ketergantungan Indonesia terhadap dollar AS beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan, hal ini mencerminkan berbagai faktor ekonomi domestik dan global. Misalnya di tahun 2018, nilai tukar mencapai 15.192 IDR/USD, yang mencerminkan tekanan ekonomi akibat kebijakan moneter yang ketat dan ketidakpastian global. Pada tahun 2020, meskipun terdapat Covid-19, nilai tukar rupiah stabil disekitar 14.000 IDR/USD, menunjukkan ketahanan tertentu. Namun, pada tahun 2022, nilai tukar kembali melemah di angka 15.000 IDR/USD akibat dampak inflasi dan ketidakstabilan pasar global, terkhusus di Amerika Serikat (CNN Indonesia, 2024).

Selain terdampak ke nilai tukar, hutang luar negeri Indonesia juga menjadi salah satu aspek yang terkena dampak dari ketergantungan terhadap Dollar AS. Per November 2023, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai angka US\$400,9 miliar atau setara dengan Rp6.235 triliun. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh utang pemerintah yang meningkat untuk mendukung belanja prioritas dan perlindungan sosial. Rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga di sekitar 29%, yang menunjukkan struktur utang yang relatif sehat meskipun dalam jumlah yang besar (Newswire, 2024).

Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan ini, diperlukan organisasi khusus yang memiliki tujuan dalam tindakan dedolarisasi. BRICS hadir dan berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih terintegrasi dan mandiri. Salah satu inisiatif utama BRICS adalah penguatan mata uang lokal dalam perdagangan antar anggota, serta pembentukan New Development Bank yang bertujuan untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang tidak bergantung pada dollar AS (BRICS, 2009). Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan terhadap

dollar AS, sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota BRICS (Ashara et al., 2022).

BRICS adalah sebuah kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS awalnya dicetuskan sebagai konsep ekonomi oleh Jim O'Neill, ekonomi dari Goldman Sachs, pada tahun 2001. Saat itu, O'Neill hanya merujuk pada BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) sebagai kelompok negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, mengubah akronim menjadi BRICS. Pertemuan formal pertama BRICS diadakan pada tahun 2006, diikuti oleh KTT pertama pada 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Sejak saat itu, BRICS telah mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas berbagai isu ekonomi dan geopolitik (O'Neill, 2001). Pada KTT ke-15 di Johannesburg pada Agustus 2023, BRICS mengambil langkah signifikan dengan mengundang empat negara baru untuk bergabung diantaranya adalah, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Perluasan ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024, menandai upaya BRICS untuk memperluas pengaruhnya di dunia berkembang (Gray & Gills, 2017). Indonesia sendiri resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Senin, 6 Januari 2025. Keputusan untuk bergabung ini dilatarbelakangi oleh kesamaan tujuan antara program kerja pemerintah Indonesia dan prioritas BRICS, seperti ketahanan pangan, pemberantasan kemiskinan, dan pemajuan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha untuk memperkuat posisinya di kancah global serta meningkatkan kerja sama dengan negara-negara *Global South* (TEMPO, 2024).

Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan global terhadap dolar AS, China, sebagai kekuatan ekonomi terbesar BRICS, memainkan peran utama dalam upaya dedolarisasi yang dilakukan oleh aliansi ini melalui berbagai langkah strategis dan terkoordinasi. China berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih strategis dan mandiri, dengan fokus pada penguatan mata uang lokal, khususnya yuan, dalam perdagangan internasional, baik melalui perjanjian bilateral maupun inisiatif keuangan global. China mendorong internasionalisasi

yuan untuk mencegah risiko geopolitik dan mengurangi ketergantungan pada dolar, hal ini disampaikan oleh ahli strategi Investasi Modal Global China Asset Management Co (ChinaAMC), Ding Wenjie pada Juni 2023 lalu (Octaviano, 2023).

Selain mendorong penggunaan mata uang yuan dalam transaksi internasional, China juga berupaya merealisasikan aksi dedolarisasi ini dengan beralih dari SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*), menghindari *Western banks* serta *clearinghouses* milik Barat. Peralihan ini kemudian mendorong China untuk menciptakan jaringan komunikasi global lain yang dapat menggantikan SWIFT lebih baik. Maka, China menghadirkan CIPS (*Cross-border International Payment System*) sebagai jawaban dari masalah ini. CIPS (*Cross-border Interbank Payment System*) adalah sistem pembayaran lintas batas yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi dalam mata uang Renminbi (RMB) secara efisien dan aman. Sistem ini dioperasikan oleh *People's Bank of China* (PBoC) dan diluncurkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya China untuk menginternasionalkan penggunaan RMB dalam perdagangan dan investasi global. (CIPS, n.d.-b).

Sebagai ekonomi terbesar di BRICS dan pesaing utama Amerika Serikat dalam ekonomi global, China telah membangun berbagai mekanisme untuk melemahkan dominasi dolar AS. *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi salah satu instrumen utama dalam dedolarisasi, di mana proyek infrastruktur yang didanai oleh China sering kali menggunakan yuan sebagai mata uang transaksi. *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah sebuah rencana infrastruktur global dan jaringan energi yang diluncurkan Cina satu dekade lalu. Proyek ini dibangun untuk menghubungkan Asia dengan wilayah Afrika dan Eropa melalui jalur darat dan laut. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan integrasi regional, meningkatkan perdagangan, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. BRI ini merupakan salah satu proyek yang dibiayai oleh CIPS sebagai pendukung kerjasama ekonomi dalam pembangunan infrastruktur dan sebagai jalur sutra baru untuk meningkatkan perdagangan dalam skala global (R. Putri, 2023).

China juga turut aktif melakukan aksi dedolarisasi dalam lingkup organisasi atau aliansi, dibuktikan dengan menjadi pelaku utama dalam pembentukan New Development Bank (NDB) yang dibentuk oleh anggota BRICS. Dimana, China sendiri menyumbang sebanyak 41 Miliar dari total 100 Miliar modal awal pembangunan NDB (Rau's IAS Study Circle, 2024). Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih independen dan mengurangi resiko volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar dolar AS. NDB berfungsi sebagai alat penting dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur tanpa ketergantungan pada dolar AS.

Selain NDB, China juga memainkan peran kunci dalam pembentukan Contingent Reserves Arrangement (CRA) pada tahun 2015, sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan memberikan perlindungan terhadap tekanan likuiditas global di antara negara-negara BRICS. CRA didukung oleh kontribusi modal substansial sebesar \$100 miliar, yang dialokasikan di antara negara-negara anggota dengan kontribusi terbesar dari Tiongkok, diikuti oleh Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. CRA, bersama dengan New Development Bank (NDB), sering kali dipandang sebagai penyeimbang lembaga keuangan tradisional yang didominasi Barat seperti International Monetary Fund (IMF) (BRICS, 2024).

BRICS yang terdiri dari negara-negara berkembang dengan potensi ekonomi besar, menawarkan platform bagi anggotanya untuk bersatu melawan dominasi ekonomi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dalam konteks ini, konsep khilafah dapat dihubungkan sebagai alternatif sistem yang lebih adil dan berkeadilan, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Khilafah, sebagai sistem pemerintahan yang ideal dalam Islam, dapat memberikan kerangka kerja yang lebih stabil dan terkoordinasi untuk negara-negara muslim dengan menghadapi tantangan global, termasuk ketidakadilan ekonomi dan politik yang sering dialami oleh negara-negara berkembang.

Prinsip keadilan ekonomi dalam Islam bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan seimbang, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Upaya ini mencerminkan nilai-nilai Islam tentang kesetaraan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi, di mana tujuan utama Islam adalah menghadirkan manfaat (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) bagi umat manusia (Sriwahyuni et al., 2023). Konsep masalah inilah yang menjadi landasan penting dalam melindungi kepentingan umum, termasuk stabilitas ekonomi negara berkembang agar terhindar dari gejolak nilai tukar dan tekanan sanksi internasional, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ardiansyah et al., 2025).

Dalam konteks aksi dedolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara BRICS, konsep masalah dapat dijadikan kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar dibandingkan potensi mudharatnya. Dedolarisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, dan membuka peluang bagi terciptanya sistem keuangan yang lebih berkeadilan. Dengan adanya stabilitas moneter yang lebih baik, dedolarisasi berpotensi membawa kemaslahatan berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Semua ini merupakan bentuk nyata dari pencapaian kemaslahatan kolektif yang menjadi tujuan syariat Islam.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam mengenai nilai masalah dalam aksi dedolarisasi BRICS untuk memahami manfaat nyata yang dapat dihasilkan, baik bagi negara-negara anggota maupun perekonomian global secara lebih luas. Analisis berbasis masalah dapat memberikan kerangka kerja yang relevan dan aplikatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga etis dan berorientasi pada kemanfaatan umat manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perspektif akademis sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi para

pengambil kebijakan dalam mewujudkan sistem keuangan global yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian dan data dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “**Analisis Nilai Kemaslahatan atas Aksi Dedolarisasi Oleh BRICS**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi dedolarisasi yang diterapkan oleh BRICS dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimana relevansi nilai masalah dalam aksi dedolarisasi BRICS?
3. Bagaimana dampak dedolarisasi BRICS terhadap perekonomian Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi dedolarisasi yang diterapkan oleh BRICS dalam perdagangan internasional
2. Untuk mengetahui relevansi nilai masalah dalam aksi dedolarisasi BRICS
3. Untuk mengetahui dampak dedolarisasi BRICS terhadap perekonomian dengan Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan sudut pandang Islam, khususnya nilai kemaslahatan, dalam memahami dan mengevaluasi upaya dedolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara BRICS.
2. Hasil penelitian dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan dalam upaya menyelaraskan sistem ekonomi Islam dengan tren ekonomi global, khususnya dalam konteks dedolarisasi.

Rekomendasi kebijakan bagi negara-negara Muslim dalam merespon dan berpartisipasi dalam upaya dedolarisasi global, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.